

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang telah menerapkan perlakuan akuntansi pendapatan yang sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2013 dan PP 71 Tahun 2010, dimana proses pengakuan, pengukuran dan pelaporan pendapatan, khususnya pendapatan yang bersumber dari penerimaan pajak dan pendapatan hibah telah diakui dan dicatat, dilaporkan dan dilaksanakan berdasarkan proses pencatatan akuntansi berbasis akrual.
2. Faktor penghambat dalam menerapkan perlakuan akuntansi pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang adalah sumber daya manusia yang kurang memadai, kurangnya tenaga kerja dalam bidang akuntansi dan jaringan internet yang sering mengalami gangguan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran bagi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang antara lain:

1. Terkait perlakuan akuntansi pendapatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang harus lebih tegas dalam menyikapi

keterlambatan khususnya laporan terkait dengan dana BOS dari pihak sekolah-sekolah.

2. Pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah harus memberi bimbingan atau pelatihan kepada pegawai, merekrut tenaga kerja akuntansi yang handal dan melengkapi sarana dan prasana agar mempermudah dalam penyelesaian laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cicilia. 2015. Analisis Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro.
- Erlina, Rambe dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013*. Jakarta:Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2010. Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi I. Yogyakarta. UPP STIM YKPN
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim dan Kusuf. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indah Natalia. 2015. Evaluasi Penerapan Akuntansi Pemerintahan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten KEP.Sangihe
- KSAP. Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah
- Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang Keuangan Negara
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perbendaharaan Negara
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
- Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Siaran Pers Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kabupaten Kupang Tahun 2018